

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2007, *Dilema Hak Kolektif Eksistensi & Realitas Sosialnya Pasca-UUPA*, Peltita Pustaka, Makassar.
2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang* Cetakan I, Kencana, Jakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Agrianti Widya Lestari, 2013, *Status Hukum Tanah Yang dikuasai Secara Turun-Temurun Oleh Masyarakat Lomponengko Kabupaten Gowa*, Tesis PPS Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Benjamin White & Gunawan Wiradi, 2009, *Reforma Agraria Dalam Tinjauan Komparatif*, Brighten Press, Bogor.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan Ujung berung, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Erlina, 2017, *Kebijakan Reformasi Agraria pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Ditinjau dari Kajian HAM dan Gender*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2.
- Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah, Dan Kebutuhan Hidup*. Penerbit Chandra Pratama, Jakarta.
- Hariadi Kartodiharjo, 2013, *Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu Dan Praktek Kehutanan*. Forci Development, Yogyakarta.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi)*, Salemba Humanika, Jakarta
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Iwan Permadi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 9 No. 2.
- Jan Michael Otto, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negeri Berkembang, dalam buku kajian Sosio-Legal*, Sulistyowati Irioanto

- dkk (editor), Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta
- Jhon Rawls, 2006, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, terjemahan dari *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jimmy Z. Usfunan, 2015, *Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, PPS Universitas Udayana, Denpasar.
- Karl R. Popper, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Laksmi Adriani, 2009, *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dan Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. STPN, Jakarta.
- M.Badai Anugrah, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Pada Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns)*, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
- M.Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, FHUI, Jakarta.
- Maria SW. Sumardjono, 2001, *Transitional Justice atas "Hak Sumber Daya Alam", dalam Komnas HAM: Keadilan Masa Transisi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah : Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Penerbit Republika, Jakarta.
- Muki T. Wicaksono dan Malik, 2019, *Konteks Politik Hukum Di Balik Percepatan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi*, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 4 Februari.
- Natu, 2021, Interview, Ketua Serikat Tani Ale Sewo Yang Ditangkap Pada Tahun 2020 karena kasus Kehutanan, Soppeng.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Rofi Wahanisa, 2015, *Model Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, dalam *Jurnal Hukum Yustisia* Vol. 4, No.2
- Rospita Odorlina P. Situmorang & Elvina R. Simanjuntak, 2015, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman*

- Wisata Alam Sicike Cike, Sumatera Utara*, dalam Jurnal Widyariset Vol. 18, No.3
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardi, 2021, Interview, Ketua Serikat Tani Coppoliang Yang Ditangkap Pada Tahun 2017 Karena Kasus Kehutanan, Soppeng
- Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, 2009, *Filsafat Hukum*, Bayumedia, Malang
- Sulaiman, 2021, Interview, Kepala Seksi ISDHL (Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan) BPKH VII Makassar, Makassar.
- Sylviani & Ismatul Hakim, 2014, *Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung*, dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 11, No. 4.
- Usep Setiawan, 2010, *Kembali Ke Agraria*. STPN Press, Konsorium Pembaruan Agraria, Sayogjo Institute, Jakarta.
- Winahyu Erwingsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Penerbit Total Media, Yogyakarta.
- Yance Arizona, 2009, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 8, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang–Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang–Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

SK.434/Menhut-II/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan

SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Laposo Ninicoing sebagai hutan konservasi

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor: SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.4/2/2016

SK: 362/Menlhk/setjen PLA.0/ 05/ 2019 Tentang perubahan peruntukan fungsi Kawasan Hutan dan penunjukan bukan Kawasan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 Tentang Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Data Tambahan

Seknas Konsorsium Pembaruan Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulawesi Selatan

YLBH-Lembaga Bantuan Hukum Makassar

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar

Website

<https://kbbi.web.id/perlindungan>